

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan organisasi sektor publik yang terbesar dan dituntut untuk menjadi organisasi yang *good government governance*. Organisasi pemerintah yang diistilahkan dengan *good government governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka dibentuklah suatu system akuntabilitas instansi pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas publik merupakan landasan utama bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Ini diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggung jawabkan tindakan dan pekerjaanya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (Mardiasmo, 2009).

Akibatnya, tidak ada indikator tunggal yang menggambarkan kinerja organisasi sektor publik secara komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi output yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik lebih banyak yang bersifat *intangibile output*. Untuk itu, pengukuran kinerja keuangan saja tidak

cukup untuk mengukur kinerja sektor publik, sehingga diperlukan pengukuran kinerja non keuangan (Mardiasmo, 2009).

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja baik yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karena, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai. Indikator kinerja tidak saja dari aspek inputs (masukan), output (keluaran), tapi juga sampai pada outcomes (hasil), benefits (manfaat), dan impacts (dampak) dari kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah (Halim dan Kusufi, 2012)

Pengukuran kinerja disebuah organisasi memiliki peran penting untuk mengetahui bagaimanakah tingkat pencapaian yang telah diperoleh sehubungan dengan kinerja yang dilakukan pada periode waktu tertentu. Dengan kata lain, pengukuran kinerja dapat membantu organisasi untuk mengkuilifikasikan tingkat efektivitas dan efisiensi yang telah dicapai organisasi pada periode yang lalu. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkesinambungan dapat memberikan manfaat kepada organisasi untuk terus melakukan perbaikan secara

terus menerus, karena dengan pengukuran kinerja organisasi dapat mengetahui bagian-bagian mana sajakah yang masih memerlukan perbaikan.

Penulis mengambil objek observasi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan dikarenakan penulis mempunyai saudara yang bekerja di Dinas tersebut sehingga mudah untuk mendapatkan data yang diperlukan. Penulis juga berkeinginan untuk mengetahui mekanisme pengukuran kinerja dan bagaimana cara melakukan evaluasi kinerja ketika menyusun LAKIP.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam observasi praktek kerja lapang ini adalah bagaimana mekanisme pengukuran kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan dalam melakukan penyusunan LAKIP.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilakukannya observasi ini adalah penulis ingin mengetahui mekanisme pengukuran kinerja yang dilakukan Dinas Kehutana dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui cara melakukan evaluasi kinerja ketika menyusun LAKIP.

Tujuan dilakukannya observasi ini adalah ketika tugas akhir ini selesai dibuat penulis menginginkan masyarakat umum khususnya masyarakat Kabupaten Bangkalan dapat mengetahui bagaimana proses pengukuran kinerja dan cara melakukan evaluasi kinerja di Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Bangkalan beserta hasil pengukuran kinerja yang berupa LAKIP, sehingga masyarakat dapat ikut berperan aktif untuk membantu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan dalam menyusun perencanaan periode selanjutnya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Dinas Kehutanan dan Perkebunan
 - a. Dapat dijadikan referensi dalam menyusun kebijakan selanjutnya.
 - b. Membantu menambah wawasan eksekutif Satuan Kerja Perangkat Daerah atas pengukuran kinerja berdasarkan peraturan yang ada.
2. Bagi Program Studi
 - a. Tugas akhir ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura.
 - b. Sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan pengukuran kinerja.
3. Bagi Peneliti
 - a. Guna memenuhi syarat kelulusan pada program studi D3 Akuntansi Sektor Publik Universitas Trunojoyo Madura.
 - b. Mengetahui mekanisme pengukuran kinerja pada suatu Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan
 - c. Menambah wawasan tentang dunia kerja yang dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Observasi ini berlokasi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Jalan Halim Perdana Kusuma No 7 Telp (031) 3096578 Kabupaten Bangkalan. Observasi ini dilaksanakan selama 30 hari kerja yakni dari tanggal 05 Januari 2015 hingga 13 Februari 2015.